



**TANGGAPAN, MASUKAN, DAN PERTANYAAN**  
**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA DPR RI**  
**DALAM RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI IV DPR RI DENGAN**  
**PEJABAT ESELON I KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI**  
**SELASA, 5 APRIL 2022**

-----

**Agenda** : **Membahas tindak lanjut Rapat Kerja tanggal 23 Maret 2022 dan lain-lain.**

**Disampaikan oleh** : **Ir. Endro Hermono, M.B.A**

**No Anggota** : **A-111**

*Assalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,*

*Salam sejahtera untuk kita semua,*

*Shalom*

*Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan,*

*Salam Indonesia Raya*

Yang Terhormat,

- 1. Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI;**
- 2. Bapak Sekjen KKP dan seluruh Pejabat Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan RI beserta jajaran;**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menjalankan aktifitas sehari-hari dengan baik. Aamiin ya rabbal alamin.

Sehubungan dengan pembahasan materi Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan, Fraksi Partai Gerindra DPR RI menyampaikan beberapa catatan, tanggapan, masukan dan pertanyaan sebagai berikut;

1. Fraksi Partai Gerindra mendukung upaya KKP dalam penyediaan BBM bersubsidi bagi nelayan dan meminta agar KKP dapat memonitoring pendistribusiannya sehingga tepat sasaran dan tepat guna.
2. Target PNBK KKP tahun 2022 sebesar 12 Triliun. Fraksi Partai Gerindra meminta agar target sasaran PNBK lebih diperjelas untuk siapa? dan sedapat mungkin tidak menjadikan nelayan kecil sebagai target PNBK mengingat saat ini kehidupan nelayan kecil semakin sulit dan dikhawatirkan akan menambah beban hidup para nelayan.
3. Fraksi Partai Gerindra meminta KKP untuk lebih memperhatikan pemanfaatan pelabuhan perikanan milik negara dibandingkan pelabuhan swasta karena terkait pertumbuhan perekonomian rakyat dan kejelasan wewenang pemberian izin alat tangkap ikan yang terkesan tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah
4. Anggaran Usulan Pagu Indikatif untuk Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Tahun 2023 Rp. 2.532.000.000.000 atau 16,88%, Dari anggaran tersebut kami Fraksi partai Gerindra meminta BRSDM untuk fokus dalam peningkatan Program - program unggulan dari BRSDM, Seperti : Pendidikan vokasi 9 SUPM, 10 Politeknik KP dan 1 Akademi, termasuk 10 Politeknik yang akan berintegrasi menjadi Institut KP Indonesia. Kami meminta kepada BRSDM KKP untuk memprioritaskan anak - anak dari pelaku perikanan sebagai calon peserta didik sebagai jalur khusus dan dipermudah persyaratan administrasinya.
5. Terkait Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan, Fraksi Partai Gerindra mendorong agar BRSDM juga fokus untuk melakukan identifikasi terhadap Kampung yang berpotensi untuk dibangun menjadi Kampung Kawasan Khusus, selanjutnya fokus dalam penerapan kompetensi yang dibutuhkan dalam membangun Kampung Kawasan Berbasis Komoditas, terkait: Keterampilan Produksi, Nilai Tambah, Labeling (Branding), Standarisasi, Pemasaran, dan kontinuitas produk serta quality control. Perhatian terhadap pendampingan dan pembinaan oleh para penyuluh dalam membuat *prototype* produk, *scaling-up*, akses modal dan penetrasi pasar (*market places*) serta sertifikasi agar terbentuknya Kampung Kawasan bisa memaksimalkan produk masuk dalam pasar digital.
6. Fraksi Partai Gerindra berpendapat bahwa penambahan anggaran program dan kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2023 menjadi sebesar Rp

15 Triliun guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan harus tercermin dalam bentuk program kegiatan yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat kelautan dan perikanan seperti; pengembangan koperasi nelayan, padat karya nelayan, pengembangan perikanan sektor budidaya, peningkatan NHCL produksi garam rakyat untuk kebutuhan industri, pembangunan dan revitalisasi sarana dan prasarana kelautan dan perikanan.

7. Pada sektor perikanan budidaya, Fraksi Partai Gerindra Gerindra meminta Dirjen Perikanan Budidaya agar segera meninjau kembali mekanisme penyaluran bantuan benih ikan, indukan ikan, indukan udang ataupun jenis lainnya untuk memperhitungkan jarak tempuh dan waktu pengiriman supaya bantuan tersebut tidak mati sia-sia ketika sampai di lokasi CPCL.
8. Fraksi Partai Gerindra Gerindra mendukung upaya Ditjen Perikanan Budidaya untuk terus meningkatkan pengembangan usaha budidaya ikan hias yang mana setiap tahunnya permintaannya semakin meningkat, seperti; tetra, rasbora, udang hias, dan ikan arwana, diantaranya melalui pemberian bimbingan teknis dan kemudahan akses pasar internasional..
9. Bantuan kapal perikanan ukuran 5 GT untuk Kabupaten Kebumen tidak dapat dialokasikan karena sulit dilakukan pendaratan. Hal ini disebabkan terjadinya pendangkalan di wilayah tersebut. Selain itu, mayoritas nelayan di Kabupaten Kebumen menggunakan kapal perikanan ukuran 1 GT, namun dikarenakan ombak yang cukup besar di pantai Selatan, maka terjadi kerusakan alat penangkapan ikan yang harus diganti setiap 6 bulan sekali. Berdasarkan data di Kabupaten Kebumen terregistrasi total kapal perikanan ukuran 1 GT mencapai 973 kapal. Terkait hal ini, Fraksi Partai Gerindra meminta apakah anggaran pembelian kapal 5 GT dapat direalokasi dan digunakan untuk penambahan pembelian alat penangkapan ikan yang sangat dibutuhkan oleh nelayan?
10. Fraksi Partai Gerindra meminta agar pembangunan kampung budidaya sebaiknya di pertimbangkan pada wilayah yang tidak memiliki perairan persisir, atau bisa diperuntukan kepada wilayah daratan/dataran tinggi. Sehingga cita-cita KKP dalam meningkatkan produksi ikan serta konsumsi ikan dapat tercapai dan masyarakat lebih dapat membiasakan konsumsi ikan.
11. Fraksi Partai Gerindra meminta agar sarana revitalisasi tambak sebanyak 9000 unit juga dapat dipertimbangkan ke wilayah budidaya ikan tambak yang masih banyak membutuhkan dukungan pembangunan atau perbaikan khususnya

- perbaikan tambak-tambak yang memiliki potensi untuk meningkatkan produksi perikanan.
12. Fraksi Partai Gerindra meminta agar rehabilitasi kawasan mangrove sebanyak 500ha juga memprioritaskan daerah pesisir yang banyak memiliki mangrove yang kritis, terkikis atau berkurang akibat perubahan iklim.
  13. Fraksi Partai Gerindra meminta agar fasilitasi akses permodalan melalui kredit program sebanyak 2585 UMKM juga perlu memperhatikan minat masyarakat yang mengusulkan, meskipun UMKM baru terbentuk ataupun yang terdampak PHK agar upaya perbaikan ekonomi dapat dirasakan pada seluruh lapisan masyarakat yang memerlukan akses modal tersebut..
  14. Salah satu prioritas KKP di tahun 2023 adalah meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. Fraksi Partai Gerindra menilai bahwa pelatihan yang akan dilaksanakan juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM penyuluh karena penyuluh merupakan salah satu ujung tombak keberhasilan pelaksanaan program KKP di masyarakat. Selain itu, Fraksi Partai Gerindra juga meminta KKP untuk meningkatkan jumlah penyuluh didaerah, karena jumlah penyuluh sangat tidak sebanding dengan luas wilayah kerja KKP. sebagai contoh di Kabupaten Lampung Timur yang pasti masih sangat kekurangan tenaga penyuluh. Dari. 24 Kecamatan hanya ada 6 PNS, 2 P3K dan 2 PPB. Mereka juga tidak memiliki kendaraan operasional roda 2 untuk mendukung kelancaran tugasnya.
  15. Fraksi Partai Gerindra meminta penjelasan KKP tentang bagaimana bentuk pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi, sehingga tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Misalnya digunakan dalam pembuatan bom ikan yang pada akhirnya dapat merusak ekosistem perikanan itu sendiri.
  16. Fraksi Partai Gerindra meminta penjelasan KKP terkait penerapan perikanan terukur dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Kami ingin mengetahui perencanaan yang sudah dibuat oleh KKP, dan aturan-aturan mengenai keberlangsungan sumberdaya serta pemanfaatannya.

**Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI;**

**Bapak Sekjen KKP, dan seluruh Pejabat Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan RI beserta jajaran;**

Demikian tanggapan, catatan, masukan, dan pertanyaan Fraksi Partai Gerindra dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan RI ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Salam Indonesia Raya.*

#### **KOMISI IV FRAKSI PARTAI GERINDRA DPR RI**

G. Budisatrio Djiwandono	- Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
Ir. KRTH. Darori Wonodipuro, M.M., IPU	- Kapoksi
DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc.	- Anggota
Ir. H. TA Khalid, M.M.	- Anggota
DR. H. Azikin Solthan, M.Si.	- Anggota
Ir. Dwita Ria Gunadi	- Anggota
Ir. Endro Hermono, M.B.A	- Anggota